

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Sebagai negara kepulauan terbesar di dunia, sektor maritim memiliki potensi besar dan menjadi bagian penting dalam kedaulatan Indonesia. Sektor maritim sangat potensial terhadap pertumbuhan ekonomi negara yang diperkirakan mencapai 257 miliar USD per tahunnya¹, di mana hasil perikanannya menempati urutan ketiga di dunia setelah India dan Tiongkok. Tidak hanya itu, diperkirakan sebanyak 70 persen cadangan energi di wilayah perairan Indonesia juga belum dimanfaatkan secara maksimal, di antaranya cadangan minyak bumi mencapai 7,4 miliar barel, dan cadangan gas alam mencapai 149 triliun kaki kubik.² Selain cadangan energi, sebagian besar masyarakat Indonesia juga tinggal di wilayah perairan, sehingga potensi akan sumber daya manusia juga besar dan dapat bermanfaat bagi perkembangan maritim Indonesia.

Dengan besarnya potensi maritim Indonesia, pada masa pemerintahan Joko Widodo periode pertama sektor maritim ditempatkan sebagai salah satu prioritas pembangunan Indonesia. Sejalan dengan hal tersebut, pemerintahan Joko Widodo mengeluarkan visi Poros Maritim Dunia sebagai target percepatan pembangunan dan keamanan maritim, serta dorongan terhadap pertumbuhan ekonomi Indonesia melalui sektor maritim. Konsep Poros Maritim Dunia yang mencuat pada tahun 2014 ini kemudian dituangkan dalam Peraturan Presiden Nomor 2 Tahun 2015

¹ Hendra Manurung, *Joko Widodo National Leaderships on Indonesia's World Maritime Policy*, (2014): 48

² Xue Song dan Xu Liping, "Indonesia's Sea Power Strategy and Maritime Cooperation with China", *China International Studies*, (2016): 109

tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2015-2019.³

Untuk mendukung implementasi visi Indonesia sebagai Poros Maritim Dunia, Presiden Joko Widodo menyampaikan bahwa terdapat lima pilar utama sebagai landasan kebijakan ini. Kelima pilar tersebut yaitu pengenalan budaya maritim, pelestarian dan pengelolaan sumber daya laut, pembangunan infrastruktur dan konektivitas maritim, diplomasi maritim, dan pengembangan kekuatan pertahanan maritim.⁴ Kelima pilar tersebut diimplementasikan sejalan dengan upaya untuk menjaga kedaulatan Indonesia, meningkatkan perlindungan warga negara dan badan hukum Indonesia, serta meningkatkan diplomasi ekonomi.

Tantangan dan permasalahan utama dalam bidang kelautan yang dihadapi Indonesia untuk mewujudkan visi Poros Maritim Dunia, di antaranya pencurian ikan secara ilegal oleh kapal-kapal nelayan asing, pengambilan ikan yang terlalu berlebihan, serta minimnya pendanaan dalam pengembangan infrastruktur kelautan. Kerugian yang diperoleh Indonesia dari penangkapan ikan ilegal setiap tahunnya mencapai 24,2 miliar USD, di mana lebih dari 5400 kapal asing menangkap ikan secara ilegal di wilayah perairan Indonesia dan kerugian mencapai 5 juta ton ikan karena penangkapan yang berlebihan.⁵ Kebanyakan penangkapan sumber daya ikan secara ilegal dilakukan oleh nelayan asal Tiongkok, Malaysia, Filipina, Thailand, dan Vietnam.

³ Safril Hidayat dan Ridwan, “Kebijakan Poros Maritim dan Keamanan Nasional Indonesia: Tantangan dan Harapan”, *Jurnal Pertahanan dan Bela Negara* 7, no.3, (2017): 108

⁴ Alfurkon Setiawan, “Indonesia’s Foreign Policy Priorities in 5 Years Ahead”, (2015), diakses melalui <https://setkab.go.id/en/indonesias-foreign-policy-priorities-in-5-years-ahead/> pada 11 September 2020

⁵ Xue Song dan Xu Liping, (2016): 109

Sebagai salah satu negara dengan kekuatan maritim terbesar di dunia, Tiongkok dianggap potensial untuk mendukung visi Poros Maritim Dunia pada pemerintahan Joko Widodo.⁶ Diplomasi maritim Indonesia terhadap Tiongkok dimulai ketika Indonesia menandatangani kesepakatan bergabung dalam *Maritime Silk Road* Tiongkok pada tahun 2015. Konektivitas maritim yang dibangun Tiongkok melalui *Maritime Silk Road* sejalan dengan visi Poros Maritim Dunia oleh Indonesia. Inisiatif Tiongkok melalui *Maritime Silk Road* adalah untuk mengembangkan infrastruktur dan kerja sama dengan negara-negara Asia Selatan dan Asia Tenggara, Samudera Hindia, serta Eropa dengan menekankan keamanan perdagangan maritim.⁷ Hal tersebut secara tidak langsung akan membuka peluang bagi Indonesia untuk lebih mudah menjalin hubungan dan kerja sama dengan negara Asia lainnya untuk mendukung visi Poros Maritim Dunia.

Tidak hanya itu, besarnya potensi konflik yang ditimbulkan oleh Tiongkok di wilayah perairan Indonesia juga menjadi dasar pendekatan dan pentingnya diplomasi maritim Indonesia terhadap Tiongkok. Salah satu tantangan yang dihadapi Tiongkok dan Indonesia adalah masalah Natuna yang telah mempengaruhi lingkungan kerja sama bilateral. Tiongkok dan Indonesia tidak memiliki sengketa wilayah di Laut Tiongkok Selatan tetapi memiliki klaim yang berbeda atas hak maritim di perairan Natuna. Namun dengan mengabaikan fakta tersebut, Indonesia melakukan penegakan hukum di perairan yang berjarak 200 mil laut dari garis pangkal kepulauan Natuna, dan seringkali menahan kapal-kapal

⁶ Embassy of The People Republic of China, *Why Belt and Road and Global Maritime Fulcrum Cooperation Benefits both China and Indonesia?*, (2019), diakses melalui <https://id.china-embassy.org/eng/sgdt/t1693736.htm> pada 25 September 2020

⁷ Hardi Alunaza SD, Moh. Sarifudin, dan Dini Septyana Rahayu, *The Strategic Cooperation between Indonesia and Tiongkok under Jokowi's Foreign Policy towards Global Maritime Diplomacy*, (2017): 11

penangkap ikan ilegal milik Tiongkok, sehingga memicu sengketa bilateral.⁸ Tindakan tersebut dilihat sebagai pelanggaran kedaulatan di wilayah perairan Indonesia.

Tercatat sejak tahun 2009 hingga pertengahan tahun 2016 terdapat setidaknya sembilan kasus praktik penangkapan ikan yang dilakukan tanpa izin oleh nelayan Tiongkok di area ZEE Indonesia.⁹ Sehingga berdasarkan hukum laut internasional hal tersebut dapat dikategorikan sebagai *Illegal, Unreported, Unregulated Fishing*. Dalam upaya penegakan hukum dan keamanan di wilayah perairan Natuna, pihak patroli dan penjaga pantai Tiongkok sering berupaya untuk menggagalkannya dengan melakukan intimidasi dan provokasi bahkan melalui tindakan fisik seperti menodongkan senjata dan menabrak kapal.¹⁰ Tiongkok juga merupakan satu-satunya negara yang mendukung nelayannya dengan kekuatan militer.¹¹

Dalam penyelesaian permasalahan bidang kemaritiman, Indonesia perlu memanfaatkan strategi diplomasi maritim sebagai pendekatan terhadap Tiongkok. Diplomasi maritim dalam kebijakan luar negeri Indonesia mencakup keseluruhan aspek yang melibatkan kemaritiman, termasuk negosiasi dalam pertahanan wilayah Zona Ekonomi Eksklusif (ZEE) Indonesia dan pentingnya pengelolaan perairan. Pada dasarnya, diplomasi maritim Indonesia terdiri dari tujuh pilar utama, yaitu peningkatan kepemimpinan dalam inisiatif bilateral, regional, dan multilateral; berperan aktif dalam menjaga perdamaian dan keamanan di laut;

⁸ Xue Song dan Xu Liping, 128

⁹ Ela Riska, "Diplomasi Maritim Indonesia Terhadap Aktivitas Penangkapan Ikan Ilegal (*Illegal Fishing*) oleh Nelayan China di ZEEI Perairan Kepulauan Natuna", *Jurnal Prodi Diplomasi Pertahanan* 3, no.2, (2017): 34

¹⁰ Ela Riska, (2017): 35

¹¹ Lupita Wijaya, "Frenemies in the Media: Maritime Sovereignty and Propaganda Regarding the South China Sea", *IKAT: The Indonesian Journal of Southeast Asia Studies* 1, no.2, (2018): 166

mengejar peran aktif dalam pembentukan norma maritim internasional; mempercepat negosiasi batas laut Indonesia dengan negara tetangga; mempercepat penyelesaian batas landas kontinen; meningkatkan kehadiran dan peran Indonesia dalam organisasi maritim internasional; menetapkan nama pulau.¹² Penggunaan diplomasi maritim pun menjadi lebih luas setelah dikeluarkannya Buku Putih Diplomasi Maritim Indonesia, yang sebelumnya hanya tertuang dalam aturan presiden saja.

Pada Buku Putih Kebijakan Kelautan Indonesia Menuju Poros Maritim Dunia yang dirilis oleh Kementerian Koordinator Bidang Kemaritiman Indonesia, dicantumkan bahwa untuk mencapai tujuannya Indonesia memiliki tujuh pilar kebijakan sebagai peta jalan menuju poros maritim dunia. Pilar-pilar kebijakan tersebut terbagi sebagai berikut yaitu : pengelolaan sumber daya kelautan dan sumber daya manusia, Pertahanan dan keamanan, penegakan hukum dan keselamatan laut, tata kelola dan kelembagaan laut, ekonomi infrastruktur dan peningkatan kesejahteraan, pengelolaan ruang laut dan perlindungan lingkungan laut, budaya bahari dan diplomasi maritim. Selain tujuh pilar kebijakan tersebut, pada Buku Putih Kemaritiman Indonesia juga dijelaskan tiga kebijakan kelautan Indonesia seperti Nawaiviva, UU NO.17/2017 tentang RPJP, dan UU NO.32/2014 tentang Kelautan. Beberapa instrument lainnya merupakan tujuh prinsip yaitu Wawasan Nusantara, Pemb. Berkelanjutan, Ekonomi Biru, Pengelolaan

¹² I Gusti Bagus Dharma Agastia, *Maritime Diplomacy-Indonesia Style*, (2019), diakses melalui <https://sr.sgpp.ac.id/post/maritime-diplomacy-indonesia-style> pada 25 September 2020

Terintegrasi dan Transparan, Partisipasi, Kesetaraan dan Pemerataan yang juga diimplementasikan pada 77 program kemaritiman.¹³

Strategi yang direncanakan Indonesia tersebut memiliki banyak kesamaan dengan Tiongkok dalam hal interkoneksi, tujuan keamanan dan diplomatik mereka.¹⁴ Berangkat dari pilar-pilar pada visi Poros Maritim Dunia dan Buku Putih Kebijakan Kelautan Indonesia, Indonesia sangat membutuhkan mitra kerjasama seperti Tiongkok. Salah satunya untuk mewujudkan pembangunan infrastruktur kelautan, Indonesia membutuhkan dorongan investasi yang besar, dan Tiongkok merupakan negara yang potensial untuk memenuhi hal tersebut. Di mana, Tiongkok mengeluarkan sebesar 40 miliar USD untuk pendanaan strategi *Silk Road* melalui KTT APEC pada tahun 2014 dan pendanaan sebesar 50 miliar USD untuk pembiayaan pembangunan inisiatif *Maritime Silk Road*-nya.¹⁵

Bagi Tiongkok, Indonesia sebagai kekuatan utama di ASEAN berperan penting untuk membangun hubungan lebih dekat antara Tiongkok dengan negara-negara di Asia Tenggara, dengan tujuan untuk menjalankan kerjasama *Maritime Silk Road*-nya.¹⁶ Hal tersebut dilakukan untuk mencapai kepentingannya karena untuk menjadi salah satu kekuatan global, Tiongkok harus menunjukkan kekuatan dan pengaruhnya di wilayah regional. Alasan lainnya adalah *good neighbor policy* merupakan strategi Tiongkok untuk memperoleh dukungan dari negara-negara

¹³ Kementerian Koordinator Bidang Kemaritiman, “Kebijakan Kelautan Indonesia”, (2019), diakses melalui <https://www.scribd.com/document/400366165/Buku-Putih-Poros-Maritim-Indonesia-pdf> pada tanggal 27 Februari 2020

¹⁴ Basten Gokkon, “China and Indonesia’s Maritime Agendas Closely Aligned,” Jakarta Globe, (2014), diakses melalui <http://jakartaglobe.beritasatu.com/news/china-and-indonesias-maritime-agendas-closely-aligned> pada tanggal 12 September 2020

¹⁵ Yose Rizal Damuri, et.al, “A Maritime Silk Road and Indonesia’s Perspective of Maritime State”, *CSIS Working Paper*, (2014): 7

¹⁶ Yose Rizal Damuri, (2014): 6

Asia Tenggara untuk meredam pengaruh Amerika Serikat.¹⁷ Kebijakan Indonesia melalui visi Poros Maritim Dunia dan Tiongkok dengan MSR-nya merupakan perwujudan dari ambisi kedua negara tersebut untuk menjadi pusat kekuatan maritim yang menjadikan upaya diplomasi Indonesia dan Tiongkok terikat dalam interdependensi ekonomi. Dengan demikian, peluang keberhasilan diplomasi maritim Indonesia terhadap Tiongkok juga semakin besar. Sehingga penelitian ini menjadi menarik untuk dibahas dalam melihat diplomasi maritim yang dilakukan oleh Indonesia terhadap Tiongkok sebagai langkah awal dalam mewujudkan visi Poros Maritim Dunia pada pemerintahan Joko Widodo.

1.2 Rumusan Masalah

Dengan besarnya potensi maritim Indonesia, pada masa pemerintahan Joko Widodo, sektor maritim ditempatkan sebagai salah satu prioritas pembangunan Indonesia. Sejalan dengan hal tersebut, pemerintahan Joko Widodo mengeluarkan visi Poros Maritim Dunia sebagai target percepatan pembangunan dan keamanan maritim, serta dorongan terhadap pertumbuhan ekonomi Indonesia melalui sektor maritim. Untuk mewujudkan visi Poros Maritim Dunia, salah satu target diplomasi maritim Indonesia adalah Tiongkok. Hal tersebut dilatarbelakangi karena Tiongkok merupakan salah satu negara dengan kekuatan maritim terbesar di dunia dan kebijakan *Maritime Silk Road*-nya dinilai sejalan dengan visi Poros Maritim Dunia Indonesia. Disamping itu, pentingnya diplomasi maritim Indonesia terhadap Tiongkok adalah sebagai strategi penyelesaian permasalahan perairan Indonesia dengan Tiongkok yang terjadi di perairan Natuna. Indonesia memerlukan mitra kerjasama seperti Tiongkok untuk mewujudkan pembangunan

¹⁷ Kurniadi, "Indonesia and Tiongkok Cooperation towards Global Maritime Diplomacy", Universitas Tanjungpura, (2020), diakses melalui <https://www.untan.ac.id/indonesia-and-tiongkok-cooperation-towards-global-maritime-diplomacy/> pada tanggal 27 Februari 2020

kekuatan maritimnya. Dalam hal ini peneliti melihat pelaksanaan diplomasi maritim menjadi salah satu alternatif bagi Indonesia untuk mencapai kepentingan dan mewujudkan visi Poros Maritim Dunia.

1.3 Pertanyaan Penelitian

Berdasarkan uraian latar belakang dan rumusan masalah di atas, maka dapat ditarik pertanyaan penelitian sebagai berikut: *bagaimana upaya diplomasi maritim Indonesia terhadap Tiongkok dalam mewujudkan visi Poros Maritim Dunia?*

1.4 Tujuan Penelitian

Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mendeskripsikan upaya diplomasi maritim yang dilakukan oleh Indonesia terhadap Tiongkok dalam rangka mewujudkan visi Poros Maritim Dunia pada pemerintahan Joko Widodo.

1.5 Manfaat Penelitian

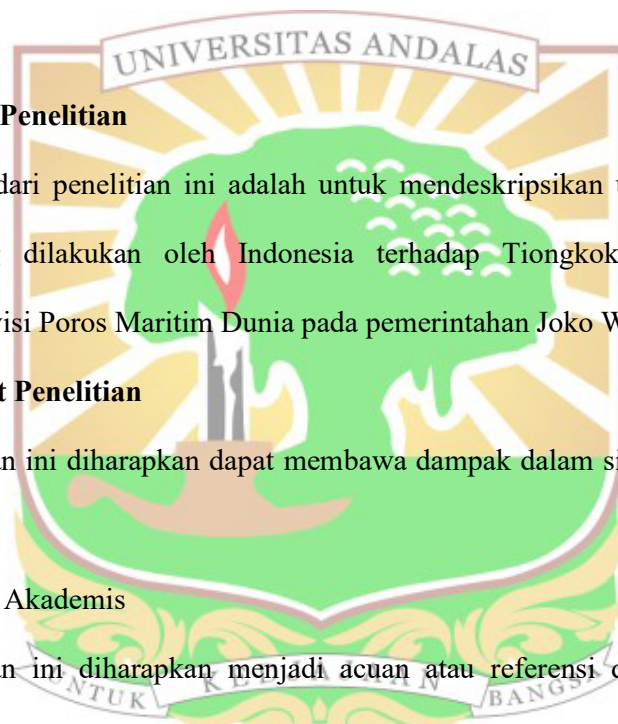
Penelitian ini diharapkan dapat membawa dampak dalam sisi akademis dan praktisnya.

1. Manfaat Akademis

Penelitian ini diharapkan menjadi acuan atau referensi dalam penelitian selanjutnya dalam studi hubungan internasional, terutama yang berkaitan dengan pelaksanaan diplomasi maritim.

2. Manfaat Praksis

Penelitian ini diharapkan dapat menambah pengetahuan pembaca baik mahasiswa maupun masyarakat secara umum dalam memahami pentingnya sektor maritim bagi Indonesia dan pelaksanaan diplomasi maritim Indonesia.



1.6 Studi Pustaka

Referensi pertama yaitu artikel yang berjudul “Diplomasi Maritim Indonesia dalam *Indian Ocean Rim Association (IORA): Peluang dan Tantangan*” oleh Dion Maulana Prasetya dan Heavy Nala Estriani.¹⁸ Dalam artikel ini dijelaskan bahwa diplomasi maritim menjadi salah satu instrumen penting bagi Indonesia untuk membangun kerja sama maritim yang lebih intensif dalam mewujudkan visi Poros Maritim pada masa pemerintahan Presiden Jokowi. Diplomasi maritim yang dijelaskan lebih difokuskan bagi negara-negara anggota IORA karena kebijakan luar negeri Indonesia sebelumnya terutama dalam bidang maritim lebih berfokus pada wilayah pasifik, sedangkan Indonesia memiliki peluang besar untuk meningkatkan kekuatan maritimnya di Samudera Hindia. Sebagai negara pemimpin dalam IORA, Indonesia memiliki peluang besar untuk meningkatkan sektor kemaritimannya yang dilihat melalui pelaksanaan diplomasi maritim.

Dalam artikel ini, peneliti menemukan adanya kesamaan dan perbedaan yang dapat dijadikan sebagai perbandingan dalam menganalisis penelitian yang sedang dilakukan. Kesamaannya terlihat pada topik yang dianalisis, yaitu diplomasi maritim Indonesia. Sedangkan perbedaannya terletak pada tujuan pelaksanaan diplomasi maritimnya. Artikel ini lebih berfokus pada peluang dan tantangan dalam diplomasi maritim yang dilakukan Indonesia khususnya IORA. Sedangkan penelitian ini lebih berfokus kepada diplomasi maritim Indonesia terhadap Tiongkok. Pembahasan artikel ini berkontribusi terhadap penelitian yang dilakukan dalam menggambarkan implementasi diplomasi maritim yang dilakukan oleh Indonesia.

¹⁸ Dion Maulana Prasetya dan Heavy Nala Estriani, “Diplomasi Maritim Indonesia Dalam *Indian Ocean Rim Association: Peluang dan Tantangan*”, *Insignia Journal of International Relations* 5, no.2, (2018)

Referensi kedua yaitu artikel yang berjudul “Indonesia’s Sea Power Strategy and Maritime Cooperation with China” oleh Xue Song dan Xu Liping.¹⁹ Artikel ini menjelaskan mengenai potensi Indonesia dalam pengembangan sumber daya maritimnya. Tidak hanya peluang yang begitu besar dalam sektor maritim, namun Indonesia juga menghadapi berbagai tantangan dalam pengembangan sektor maritim, di mana hal tersebut disebabkan oleh minimnya kapabilitas pertahanan maritim serta banyaknya kejahatan yang terjadi di wilayah perairan Indonesia salah satunya pencurian ikan oleh kapal-kapal asing. Dalam artikel ini juga dijelaskan mengenai strategi *sea power* Indonesia dalam menghidupkan kembali budaya maritim, perlindungan terhadap sumber daya maritim, peningkatan infrastruktur sektor maritim dan penerapan diplomasi maritim serta peningkatan pertahanan maritim. Di samping itu, dalam penguatan sektor maritim, Tiongkok dengan kebijakan *Maritime Silk Road*-nya dapat menjadi mitra yang potensial bagi Indonesia. Secara umum, pembahasan dalam artikel ini membantu peneliti untuk menjelaskan hubungan Indonesia dan Tiongkok dalam bidang maritim yang dilihat melalui kerja sama yang dilakukan oleh kedua negara, serta menggambarkan tantangan dalam kerja sama maritim Indonesia dan Tiongkok.

Referensi ketiga yaitu artikel yang berjudul “Smart Maritime Diplomacy: Diplomasi Maritim Indonesia Menuju Poros Maritim Dunia” oleh Najamuddin Khairur Rijal.²⁰ Artikel ini membahas upaya diplomasi maritim Indonesia pada pemerintahan Joko Widodo khususnya di kawasan Asia Tenggara dalam mewujudkan visi Poros Maritim Dunia. Pentingnya penerapan diplomasi maritim

¹⁹ Xue Song dan Xu Liping, “Indonesia’s Sea Power Strategy and Maritime Cooperation with China”, *China International Studies*, (2016)

²⁰ Najamuddin Khairur Rijal, “Smart Maritime Diplomacy: Diplomasi Maritim Indonesia Menuju Poros Maritim Dunia”, *Jurnal Global dan Strategis* 13. no.1, (2019)

oleh Indonesia adalah untuk kedaulatan maritim dan menjamin integritas wilayah perairan Indonesia agar terhindar dari ancaman kejahatan laut serta menjaga keamanan sumber daya maritim Indonesia. Artikel ini menekankan bahwa diplomasi maritim yang dilakukan Indonesia di kawasan Asia Tenggara dan ASEAN menggunakan dua pendekatan, yaitu *soft maritime diplomacy* yang dilakukan melalui kerja sama dan persuasi, dan *hard maritime diplomacy* yang diwujudkan melalui tindakan koersif dalam bentuk kebijakan tegas terhadap pelanggaran penangkapan ikan secara ilegal. Rijal menjelaskan bahwa pengintegrasian dua bentuk diplomasi maritim ini pada saat yang bersamaan disebut dengan *smart maritime diplomacy*.

Dalam artikel ini, peneliti menemukan adanya kesamaan dan perbedaan dengan topik penelitian. Kesamaannya terlihat pada fokus analisis yaitu aktivitas diplomasi maritim Indonesia. Sedangkan perbedaannya terletak pada target diplomasinya, di mana target diplomasi maritim yang dijelaskan dalam artikel ini adalah Asia Tenggara dan ASEAN, sedangkan penelitian ini akan berfokus pada diplomasi maritim Indonesia terhadap Tiongkok.

Referensi keempat adalah artikel yang berjudul “Global Maritime Fulcrum, Indonesia-China Growing Relations, and Indonesia’s Middlepowermanship in the East Asia Region” oleh Nanto Sriyanto.²¹ Artikel ini menjelaskan mengenai perkembangan hubungan Indonesia dan Tiongkok serta kaitannya dengan kebijakan poros maritim Indonesia. Indonesia dan Tiongkok memiliki keinginan yang sama yaitu penguatan konektivitas maritim melalui Poros Maritim Dunia dan *Maritime Silk Road*, sehingga hal tersebut membuka peluang bagi kedua

²¹ Nanto Sriyanto, “Global Maritime Fulcrum, Indonesia-China Growing Relations, and Indonesia’s Middlepowermanship in the East Asia Region”, *Jurnal Kajian Wilayah* 9, no.1, (2018)

negara untuk melakukan kerja sama dalam bidang maritim. Dalam artikel ini dijelaskan perkembangan hubungan maritim Indonesia dan Tiongkok dari pemerintahan sebelumnya sampai dengan pemerintahan Presiden Jokowi. Penjelasan ini membantu peneliti untuk menggambarkan upaya Indonesia sebagai negara kekuatan menengah dalam meningkatkan kekuatan maritimnya melalui kebijakan poros maritim dan kaitannya dengan kebijakan *Maritime Silk Road* Tiongkok. Sriyanto menjelaskan bahwa perkembangan hubungan ekonomi dengan Tiongkok akan membantu Indonesia dalam mewujudkan pembangunan infrastruktur strategis yang akan berdampak bagi pertumbuhan ekonomi negara, namun kedekatan tersebut akan berpengaruh bagi politik luar negeri Indonesia sebagai negara kekuatan menengah jika tidak terimbangi. Perbedaannya dengan penelitian yang dilakukan oleh peneliti terletak pada fokus penelitiannya, di mana penelitian ini akan lebih berfokus kepada upaya yang dikategorikan dalam diplomasi maritim karena besarnya potensi tersebut bagi Indonesia.

Referensi terakhir yaitu artikel yang berjudul “The Strategic Cooperation between Indonesia and Tiongkok under Jokowi’s Foreign Policy towards Global Maritime Diplomacy” oleh Hardi Alunaza SD, Moh Sarifudin, dan Dini Septyana Rahayu.²² Artikel ini berfokus pada pembahasan terkait kerja sama Indonesia dan Tiongkok pada masa pemerintahan Joko Widodo dibawah kerangka kebijakan Poros Maritim Dunia dalam penguatan diplomasi publik di kawasan Indo-Pasifik. Ambisi Indonesia dalam penguatan maritim melalui Poros Maritim Dunia beriringan dengan kebijakan *Maritime Silk Road* Tiongkok yang saling berpengaruh satu sama lain. Indonesia dan Tiongkok menyetujui penguatan

²² Hardi Alunaza SD, Moh. Sarifudin, dan Dini Septyana Rahayu, *The Strategic Cooperation between Indonesia and Tiongkok under Jokowi’s Foreign Policy towards Global Maritime Diplomacy*, (2017)

kebijakan strategisnya untuk peningkatan sektor maritim, baik kerja sama ekonomi maupun infrastruktur.

Berdasarkan referensi terakhir ini, peneliti menemukan adanya kesamaan dan perbedaan dengan penelitian yang sedang dilakukan. Kesamaannya terletak pada fokus penelitiannya yaitu mewujudkan visi Indonesia menuju Poros Maritim Dunia pada masa pemerintahan Joko Widodo. Analisis pada artikel di atas hanya berfokus kepada alasan dan peluang kerja sama Indonesia dan Tiongkok dalam mewujudkan visi Poros Maritim Dunia, sedangkan penelitian ini akan lebih berfokus kepada analisis tindakan dan upaya Indonesia dalam mewujudkan visi tersebut yang dilihat melalui kerangka diplomasi maritim.

1.7 Kerangka Konseptual

1.7.1 Diplomasi Maritim

Diplomasi maritim muncul sebagai salah satu alternatif bagi negara dalam menghadapi banyaknya permasalahan perairan seperti pencurian ikan ilegal, sengketa kepemilikan pulau, maupun konflik lainnya serta sebagai upaya untuk mencapai kepentingan nasional yang berkaitan dengan kedaulatan maritim. Berbeda dengan diplomasi konvensional, diplomasi maritim tidak terpaku kepada negosiasi bilateral yang dilakukan oleh kepala pemerintahan. Secara sederhana bisa diartikan bahwa diplomasi maritim sebagai upaya diplomasi suatu negara terhadap negara lainnya dalam kepentingan maritim. Menurut Christian Le Mière, diplomasi maritim adalah manajemen hubungan internasional melalui ranah maritim, di mana penggunaan diplomasi bukan hanya dimaksudkan untuk menyelesaikan ketegangan maritim melalui hukum internasional, namun lebih

kepada penggunaan aset-aset maritim sebagai instrumen diplomasinya.²³ Sehingga angkatan laut, penjaga pantai, dan pasukan militer laut dapat dikatakan sebagai instrumen penting dalam diplomasi maritim.

Diplomasi maritim juga dapat diartikan sebagai strategi pendayagunaan kapabilitas nasional yang difokuskan pada isu keamanan maritim secara domestik dan global. Bagi Indonesia, diplomasi maritim dioperasionalkan melalui tiga dimensi yaitu: dimensi kedaulatan, dimensi keamanan, dan dimensi kesejahteraan.²⁴ Menurut Mièrè, diplomasi maritim dapat dikategorikan menjadi tiga bagian, yaitu diplomasi maritim kooperatif, diplomasi maritim persuasif, dan diplomasi maritim koersif.²⁵

Diplomasi maritim kooperatif bisa dikatakan bertujuan untuk mendukung penggunaan *soft power* dengan menggunakan instrumen *hard power*. Dalam upaya penyelesaian masalah dan mencapai kepentingan kemaritiman, pelaksanaan diplomasi maritim kooperatif lebih mengedepankan tindakan seperti kerja sama yang meliputi pertukaran personel, program pendidikan, latihan keamanan maritim bersama, dan lainnya yang bertujuan untuk membangun kesepahaman bersama. Tidak hanya itu, diplomasi maritim kooperatif bertujuan untuk membangun koalisi, mendukung aliansi melalui *confidence building training*, dan membangun kepercayaan melalui kekuatan angkatan laut.²⁶

²³ Christian Le Mièrè, *Maritime Diplomacy in 21st Century: Drivers and Challenges*, (New York: Routledge, 2014): 7

²⁴ Kementerian Luar Negeri Indonesia, *Diplomasi Poros Maritim: Keamanan Maritim Dalam Perspektif Politik Luar Negeri*, (2016): 4

²⁵ Christian Le Mièrè, (2014): 3

²⁶ Christian Le Mièrè, (2014): 9

Pada dasarnya terdapat empat komponen yang termasuk dalam diplomasi maritim kooperatif:²⁷

1. *Humanitarian Assistance and Disaster Relief*

Salah satu bentuk tindakan yang tergolong dalam diplomasi maritim kooperatif berupa bantuan kemanusiaan dan pertolongan ketika terjadi bencana dengan cara mengirimkan kapal ataupun angkatan lautnya. Tentu saja tujuan bantuan tersebut adalah untuk menunjukkan kedekatan dan memberi pengaruh terhadap negara tujuan. Contohnya bantuan Angkatan Laut Australia yang bekerja sama dengan TNI dalam menyelamatkan korban bencana tsunami Aceh pada tahun 2004 yang disambut baik oleh Indonesia meskipun sebelumnya hubungan kedua negara tersebut tidak begitu baik karena keterlibatan Australia terhadap keluarnya Timor-Timur. Hal ini menjadi contoh bahwa diplomasi maritim kooperatif bisa membawa dampak diplomatik yang positif.

2. *Goodwill Visit*

Dalam hal ini bentuk tindakan yang dilakukan oleh negara adalah dengan cara berlayar ke negara satu atau beberapa negara yang menjadi tujuannya. Umumnya kunjungan ini dilakukan untuk meningkatkan hubungan diplomatik keduanya dan menjalin kerja sama. Salah satu contohnya adalah *goodwill visit* yang dilakukan oleh kapal perang angkatan laut Indonesia ke Manila pada tahun 2019.²⁸ Tujuan dari kunjungan tersebut adalah sebagai bagian dari visi Poros Maritim

²⁷ Christian Le Mière, (2014): 9

²⁸ MRIC, *Look: Indonesian Navy Warship in Manila for Goodwill Visit*, (2019), diakses melalui <http://mric.gov.ph/look-indonesian-navy-warship-in-manila-for-goodwill-visit/> pada 12 September 2020

ASEAN serta untuk meningkatkan hubungan maritim dengan negara tetangga dalam kawasan.

3. *Training and Joint Exercise*

Dalam hal ini, diplomasi maritim kooperatif juga dilakukan melalui latihan militer gabungan oleh negara kedua negara. Latihan militer gabungan ini bertujuan untuk membangun kekuatan angkatan laut yang lebih sepadan karena hal tersebut sangat berguna bagi negara itu sendiri.²⁹ Selain itu, latihan militer gabungan juga dimanfaatkan untuk membangun aliansi antarnegara dan menghilangkan kecurigaan masing-masing. Contohnya, latihan angkatan laut gabungan “Samudra Sakhti” antara Indonesia dan India dalam Teluk Benggala, di mana latihan tersebut mencakup berbagai hal untuk memperkuat pertahanan maritimnya.³⁰

Tidak hanya itu, *training and joint exercise* dalam diplomasi maritim terkadang juga dilakukan melalui pertukaran personel secara reguler antara angkatan laut dan penjaga pantai. Contohnya sekolah kelautan *Britania Royal Navy College* di Dartmouth yang selalu mengambil mahasiswa dari angkatan laut luar negeri setiap tahunnya.

4. *Joint Maritime Security Operations*

Bentuk diplomasi maritim kooperatif dalam hal ini adalah melalui operasi militer gabungan sebagai upaya untuk meningkatkan keamanan

²⁹ Angela Merici, *Cooperative Maritime Diplomacy of United States of America Towards Maritime Piracy in Gulf of Aden, Off the Coast Somalia*, (2017): 14

³⁰ All India, *India, Indonesia Hold Joint Naval Exercise “Samudera Sakhti” in Bay of Bengal*, (2019), diakses melalui <http://www.ndtv.com/india-news/samudera-sakhti-india-and-indonesias-joint-naval-exercise-across-bay-of-bengal-2129039?famp=1&akamai-rum=off> pada 12 September 2020

maritim. Selain untuk pertahanan maritim, operasi militer gabungan juga bertujuan untuk memperkuat hubungan dengan negara aliansi serta mempengaruhi negara yang menjadi rival atau potensi ancaman bagi keamanan maritim negara.³¹ Contohnya adalah operasi angkatan laut gabungan yang dilakukan oleh Indonesia dan Australia pada tahun 2010 yang dinamakan dengan *Excercise Cassowary 2010 (CA10)*.³²

Sedangkan diplomasi maritim persuasif lebih kepada tindakan untuk membangun citra maritim negara. Berbeda dengan diplomasi maritim kooperatif, tujuan pelaksanaan diplomasi maritim persuasif adalah untuk meningkatkan pengakuan negara atau pihak lain terhadap kekuatan nasional yang dimiliki oleh suatu negara sekaligus membangun wibawa negara tersebut dalam sistem internasional.³³ Sehingga secara tidak langsung hal tersebut akan mempengaruhi pihak lain terhadap kapabilitas maritimnya. Salah satu bentuk diplomasi maritim persuasif adalah *showing the flag*. Hal ini dimaksudkan dengan pengibaran bendera negara sebagai penanda eksistensi negara tersebut di wilayah kedaulatan maritimnya seperti bendera negara pada kapal patroli. Tidak seperti diplomasi kooperatif dan koersif, pengaruh pelaksanaan diplomasi maritim persuasif cenderung tidak jelas dan operasi angkatan laut juga bisa menghabiskan biaya yang besar. Oleh karena itu, kegiatan diplomasi maritim persuasif sering kali terselubung dalam kegiatan lainnya dan pengaruhnya bahkan mungkin tidak disengaja.³⁴

³¹ Angela Merici, (2017): 14

³² Australian Embassy Indonesia, *Australia and Indonesia Undertake Joint Naval Operation*, (2010), diakses melalui http://indonesia.embassy.au/jakt/MR10_045.html pada 12 September 2020

³³ Najamuddin Khairur Rijal, (2019): 69

³⁴ Christian Le Mière, (2014): 13

Selanjutnya, diplomasi maritim koersif yang bisa ditafsirkan sebagai penggunaan instrumen militer untuk mengamankan kepentingan nasional atau kedaulatan maritim negara. Diplomasi maritim koersif terkadang dilakukan ketika terjadi perselisihan antar aktor. Diplomasi maritim ini bisa menjadi alternatif untuk mengurangi potensi terjadinya konflik, menghalangi musuh, menghilangkan ancaman dan menyelesaikan perselisihan dengan menggunakan ancaman atau ancaman kekuatan terbatas.³⁵

Menurut James Cable, penggunaan ancaman kekuatan terbatas bukan hanya sebagai tindakan perang tapi untuk mengamankan keuntungan atau untuk menghindari kerugian baik dalam perselisihan internasional ataupun melawan warganegara asing yang berada dalam teritorial atau yurisdiksi negara tersebut.³⁶ Penggunaan ancaman oleh satu pihak dalam konteks strategi militer adalah untuk meyakinkan pihak lain dalam menahan dan menagkal sebagai upaya tindakan yang akan dilakukannya karena biaya dan kerugian yang akan ditimbulkannya.³⁷ Contohnya adalah penenggelaman kapal asing yang dilakukan oleh Indonesia karena telah melakukan penangkapan ikan secara ilegal di wilayah perairan Indonesia.

Konsep diplomasi maritim yang dikemukakan oleh Christian Le Mière di atas akan peneliti jadikan sebagai kerangka konseptual untuk menganalisis dan menjawab pertanyaan penelitian ini. Melalui konsep ini, peneliti akan menjelaskan bentuk diplomasi maritim yang dijalankan oleh Indonesia terhadap

³⁵ Christian Le Mière, (2014): 3

³⁶ James Cable, *Gunboat Diplomacy*, dalam Christian Le Mière, *Maritime Diplomacy in 21st Century: Drivers and Challenges*, (New York: Routledge, 2014): 15

³⁷ Muhammad Hary Riana Nugraha dan Arifin Sudirman, "Maritime Diplomacy Sebagai Strategi Pembangunan Keamanan Maritim Indonesia", *Jurnal Wcana Politik* 1, no.2, (2016): 177

Tiongkok Dalam mewujudkan visi Poros Maritim pada pemerintahan Joko Widodo.

1.8 Metodologi Penelitian

1.8.1 Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian kualitatif yang menekankan pada pencarian makna yang terjadi dalam kehidupan sosial. Dalam penelitian kualitatif, analisis dilakukan dengan menggunakan data berupa fakta yang bersifat naratif dan bukan angka.³⁸ Metode penulisan yang digunakan dalam penelitian ini adalah deskriptif analitis yang menggambarkan bentuk diplomasi maritim yang dilakukan Indonesia terhadap Tiongkok untuk mewujudkan visi Poros Maritim Dunia. Penggunaan metode penulisan deskriptif analitis bertujuan untuk menyampaikan masalah yang diteliti dengan cermat sehingga menghasilkan argumen atau tulisan yang dapat dipertanggungjawabkan.

1.8.2 Batas Penelitian

Penulis memberikan batasan pada obyek yang diteliti yaitu pada bentuk diplomasi maritim yang dilakukan Indonesia terhadap Tiongkok pada masa pemerintahan Joko Widodo periode pertama, dalam rentang waktu dari tahun 2015 hingga 2019. Di mana, pada rentang tahun tersebut Indonesia mulai mengangkat visi Poros Maritim Dunia dan menjalankan berbagai kerja sama maritim dengan Tiongkok untuk mewujudkan visi Poros Maritim Dunia.

³⁸ Sugiyono, "Metode Penelitian Kualitatif", Bandung: Alfabeta (2017): 3

1.8.3 Unit dan Level Analisis

Unit analisis merupakan unit yang perilakunya dideskripsikan, dijelaskan dan diteliti dalam sebuah penelitian.³⁹ Dalam penelitian ini, unit analisisnya adalah Indonesia. Peneliti berfokus untuk melihat langkah diplomasi maritim apa saja yang dijalankan Indonesia terhadap Tiongkok yang berkaitan dengan upaya untuk mewujudkan visi Indonesia sebagai Poros Maritim Dunia. Sementara itu, unit eksplanasi merupakan unit yang mempengaruhi perilaku unit analisis yang digunakan.⁴⁰ Oleh karena itu, unit ekplanasi dalam penelitian ini adalah Kebijakan *Maritime Silk Road* Tiongkok. Di mana, Tiongkok dilihat sebagai negara paling potensial bagi Indonesia dalam bidang maritim serta kekuatan maritimnya yang besar. Sedangkan tingkat analisisnya berada di level negara karena disini penulis menjelaskan relasi hubungan antara dua negara, yaitu Indonesia yang melakukan diplomasi maritim terhadap Tiongkok.

1.8.4 Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data dalam penelitian ini adalah teknik studi kepustakaan. Penulis mengumpulkan data dari berbagai sumber yang berkaitan dengan masalah yang dibahas. Berbagai sumber tersebut menjadi pedoman bagi penulis untuk memecahkan permasalahan yang diteliti. Sumber tersebut seperti buku, artikel, jurnal, laporan, dokumen resmi, dan bacaan lain yang membahas bentuk dan upaya diplomasi maritim yang dilakukan Indonesia terhadap Tiongkok untuk mewujudkan visi Poros Maritim Dunia.

³⁹ Mochtar Mas' oed, "Ilmu Hubungan Internasional Disiplin dan Metodologi", LP3ES, (1994): 35

⁴⁰ Mochtar Mas' oed, 35

1.8.5 Teknik Pengolahan Data

Dalam penelitian ini, berbagai sumber data yang telah dikumpulkan kemudian diseleksi sesuai dengan kebutuhan penelitian sehingga dapat menjelaskan masalah dalam penelitian. Data-data yang berasal dari buku, artikel, jurnal, laporan, dan dokumen resmi tersebut dikumpulkan melalui serangkaian kegiatan observasi. Data-data yang didapatkan tersebut kemudian dianalisis dengan cara menetapkan, menjabarkan, dan merangkai alur sebab-akibat dengan memilah dan memilih data yang terpenting dan sesuai dengan penelitian. Kemudian data dan fakta yang ada dicocokkan dan dianalisis dengan konsep yang telah ditentukan, yaitu konsep Diplomasi Maritim oleh Christian Le Mière, sehingga mampu menjawab pertanyaan penelitian yang sudah ditentukan sebelumnya.⁴¹

1.8.6 Sistematika Penulisan

BAB I : PENDAHULUAN

Bab ini berisi latar belakang masalah, rumusan masalah, pertanyaan penelitian, tujuan penelitian, manfaat penelitian, studi pustaka, kerangka konseptual, metodologi penelitian dan sistematika penulisan.

BAB II : SEJARAH KEMARITIMAN INDONESIA DAN VISI POROS MARITIM DUNIA

Bab ini menjelaskan sejarah disebutkan Indonesia sebagai negara maritim dan gambaran umum visi Poros Maritim Dunia yang diperkenalkan oleh Presiden

⁴¹ Barbara B. Kawulich, "Data Analysis Techniques in Qualitative Research," *Journal of Research in Education*, Vol. 14, No. 1 (2004): 97

Joko Widodo pada tahun 2014. Selain itu, bab ini juga menjabarkan faktor yang mendorong Indonesia untuk melakukan diplomasi maritim terhadap Tiongkok.

BAB III : DINAMIKA HUBUNGAN INDONESIA DENGAN TIONGKOK

Dalam pembahasan ini dijelaskan mengenai dinamika hubungan antara Indonesia dengan Tiongkok dengan melihat kedekatan yang terjalin antara keduanya dari beberapa aspek, diantaranya yaitu aspek sejarah, geopolitik dan keamanan. Selain itu, bab ini juga akan membahas dinamika kerja sama kedua negara dalam bidang maritim untuk mengetahui seberapa jauh pengaruh yang didapat keduanya.

BAB IV : DIPLOMASI MARITIM INDONESIA TERHADAP TIONGKOK UNTUK MEWUJUDKAN VISI POROS MARITIM DUNIA

Bab ini menjelaskan mengenai bentuk dan upaya diplomasi maritim yang dilakukan Indonesia terhadap Tiongkok untuk mewujudkan visi Poros Maritim Dunia dengan menggunakan konsep diplomasi maritim oleh Christian Le Mière. Dalam bab ini juga dipaparkan keberhasilan yang telah dicapai Indonesia dalam melakukan diplomasi maritim dengan Tiongkok berdasarkan indikator dari konsep diplomasi maritim yang digunakan.

BAB V : KESIMPULAN

Bab ini berisi ringkasan atau rangkuman dari keseluruhan penjelasan dan pembahasan dari bab I hingga bab IV yang telah disampaikan diatas.